

# PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Kurniati<sup>\*1</sup>, Sylvia<sup>2</sup>, Abdullah<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

**E-mail:** <sup>\*1</sup>kurniatiniya79@gmail.com, <sup>2</sup>Sylvia.sjarlis2013@gmail.com, <sup>3</sup>abdullah@stienobel-indonesia.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial maupun simultan Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini menghasilkan nilai koefisien determinasi  $R^2$  atau  $R$  Square sebesar 0,421. Hasil ini berarti bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebesar 42,1%, dan sisanya 57,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Penyajian, Aksesibilitas, Kualitas, Akuntabilitas

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effect of the presentation of financial statements, the accessibility of financial reports, and the quality of financial reports on the accountability of financial reporting. The data type used in this study is quantitative, while the data source uses primary data. The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.*

*The results of this study prove that partially or simultaneously, the Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, and Quality of Financial Statements have a positive and significant effect on the Accountability of Financial Reporting of the Regional Secretariat of Maros Regency. This study produces a coefficient of determination of  $R^2$  or  $R$  Square of 0.421. This result means that the variables Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, and Quality of Human Financial Reports are related to Financial Reporting Accountability by 42.1%. Other causes outside the model explain the remaining 57.9%.*

**Keywords:** Taxes, Inflation, Regional Wealth Management, Local Own Revenue

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem good governance dimana dalam sistem ini Negara Indonesia mengacu pada pertumbuhan pembangunan, ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara. Dalam penyelenggara Negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara, karena aspek keuangan Negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap

kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dan mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor yang lain yang menyebabkan meningkatnya dan menjadi pusat perhatian isu transparansi di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia terkhususnya di pemerintahan menuntut adanya transparansi laporan keuangan yang menjadi salah satu tujuan dari sebuah instansi untuk dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nordriawan, 2014).

Pentingnya transparansi keuangan publik di Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Melalui Undang-undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus terbuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya suatu akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban atas laporan keuangan karena Pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar dalam mengelola keuangan demi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2017). Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Fauziyah & Handayani, 2017).

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan suatu elemen dasar dari transparansi keuangan publik dan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah. Jika penyajian laporan keuangan suatu entitas dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka terciptanya tujuan suatu pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga dalam menyajikan laporan keuangan secara akuntabel.

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian akuntansi yang transparan akan mewujudkan akuntabilitas publik karena penyajian informasi yang utuh dan transparan akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas kepada publik (Nordawan, 2014). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum.

Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Jika pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas transparansi keuangan dengan akses yang bisa dicapai oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tentunya dapat mengetahui informasi laporan keuangan dan juga dapat melakukan pengawasan dengan lebih leluasa.

Secara umum, aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), aksesibilitas laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah. Akses laporan keuangan daerah yang semakin mudah maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta.

Adapun faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dalam ruang lingkup akuntansi memiliki dampak yang sangat besar karena dengan adanya pengawasan kualitas laporan keuangan suatu entitas dapat tercapainya tujuan dan terciptanya kinerja yang baik. Pengawasan kualitas laporan keuangan diterapkan dalam kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga jika pengawasan kualitas laporan keuangan dilakukan oleh suatu entitas dengan baik maka terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik yang berhak untuk mengetahuinya.

Kualitas pelaporan Keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pengawasan optimal yang didasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah oleh instansi pemerintah mengenai kualitas laporan keuangan, menjadikan laporan keuangan tersaji secara akurat dan wajar sehingga pengguna dapat menjadikan sebagai bukti (Pramayana, dkk., 2022). Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pemantauan kualitas pelaporan keuangan yang optimal dan tepat sehingga pekerjaan pemerintah optimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu entitas pelaporan yang

diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dibandingkan dengan wilayah atau sebagian daerah pemerintahan lainnya yang dalam proses penyajian laporan keuangannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah pemerintah Kabupaten Maros sendiri telah berturut-turut memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan mulai dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021.

Demi membangun Negara Indonesia yang sejahtera, mampu berdaya saing, menciptakan solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial pemerintah Kabupaten Maros dituntut untuk mampu menilai kondisi dan perkembangan daerahnya agar mencapai target yang diinginkan sehingga perlu diperhatikan laporan keuangan milik pemerintah Kabupaten Maros dan ada hak untuk masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui informasi laporan keuangan yang transparan. Transparansi ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

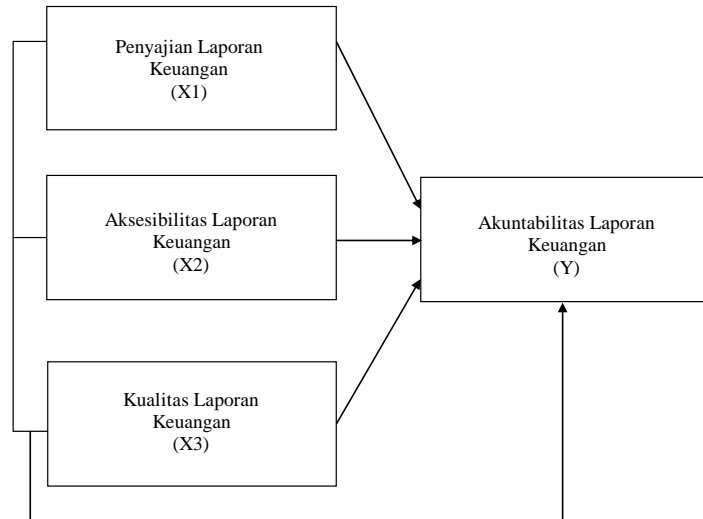
Fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat dari tingkat transparansi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros yang masih perlu ditingkatkan, sebab meski Pemerintah Kabupaten Maros sudah memiliki situs atau website yang dapat diakses pada alamat <https://maroskab.go.id>. Diluncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk semakin terbukanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat luas. Namun, masalah yang terjadi adalah laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia, dimana pemerintah belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik. Sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui website Pemerintah Kabupaten Maros, internet atau pun akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan dan belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat (publik).

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain masyarakat berhak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, berhak untuk mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, berhak untuk mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, berhak untuk diberi informasi secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik, berhak untuk didengar aspirasinya yang meliputi hak untuk diberi aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan.

Dengan demikian laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa pada publik. Namun realitas yang terjadi dilapangan, pemerintah kurang efisien terhadap transparansi kepada masyarakat melainkan laporan keuangan tersebut hanya dipublikasikan dalam lingkungan pemerintah saja, padahal masyarakat berperan penting terhadap keterbukaan laporan kinerja Pemerintah selain itu Otonomi Daerah masih dipahami secara sempit sehingga hanya Pemerintah Daerah yang aktif, sedangkan peran serta masyarakat luas belum terkena dampaknya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi maka Pemerintah Daerah harus memiliki aksesibilitas yang memadai guna

memudahkan para *stakeholder* untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Pemerintah Daerah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

**Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian**



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat beberapa hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros
3. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros
4. Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.
5. Kualitas Laporan Keuangan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode survei digunakan dalam mengetahui sikap, pengetahuan, serta tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang dikemukakan dalam instrumen penelitian (kuesioner). Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk suatu penelitian (Sugiyono, 2018). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, yang beralamat di JL. Jend. A. Yani, No. 6, Turikale, Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Populasi yang digunakan yaitu para kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yang menurut Wardiningdyah (2022) terdiri dari : 1) Masyarakat, 2) Wakil



rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, 3) Pemerintah itu sendiri, Dalam penelitian ini ukuran sampel diambil dengan menggunakan Rumus *Hair*. Sehingga, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, didapat jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebesar 95 orang yang berasal dari kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintahan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2017). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket (questionnaire).

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji validitas merupakan jenis pengujian statistik dengan meneliti valid tidaknya sebuah data penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel. Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh r-tabel 0,203.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	Pernyataan 1	0,784	0,203	Valid
	Pernyataan 2	0,677	0,203	Valid
	Pernyataan 3	0,547	0,203	Valid
	Pernyataan 4	0,651	0,203	Valid
	Pernyataan 5	0,784	0,203	Valid
	Pernyataan 6	0,651	0,203	Valid
	Pernyataan 7	0,794	0,203	Valid
	Pernyataan 8	0,677	0,203	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	Pernyataan 1	0,756	0,203	Valid
	Pernyataan 2	0,800	0,203	Valid
	Pernyataan 3	0,765	0,203	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (X3)	Pernyataan 1	0,794	0,203	Valid
	Pernyataan 2	0,787	0,203	Valid
	Pernyataan 3	0,437	0,203	Valid
	Pernyataan 4	0,770	0,203	Valid
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y)	Pernyataan 1	0,661	0,203	Valid
	Pernyataan 2	0,674	0,203	Valid
	Pernyataan 3	0,770	0,203	Valid
	Pernyataan 4	0,731	0,203	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 1. diketahui bahwa masing-masing item pernyataan memiliki r-hitung > r-tabel (0,203) dan bernilai positif. Dengan demikian setiap pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan layak dilanjutkan untuk melakukan penelitian.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,846	0,50	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,664	0,50	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (X3)	0,667	0,50	Reliabel
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y)	0,670	0,50	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 2. menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki *cronbach alpha* > 0,50. Dengan begitu, semua variabel X dan Y dapat dinyatakan reliabel.

## Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.591	2.216		.267	.790
	X1 (Penyajian Laporan Keuangan)	.093	.042	.184	2.216	.029
	X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan)	.311	.106	.238	2.938	.004
	X3 (Kualitas Laporan Keuangan)	.570	.099	.483	5.733	.000

a. Dependent Variable: Y (Akuntabilitas Pelaporan Keuangan)

Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,591 + 0,093 X_1 + 0,311 X_2 + 0,570 X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda diatas dapat interprestasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0,591 (positif) artinya, jika variabel bebas, yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan nilainya tetap atau konstan, maka variabel terikat, yaitu Akuntabilitas Pelaporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,591 satuan.
2. Nilai koefisien variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) sebesar 0,093 artinya jika Penyajian Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan akan meningkat sebesar 0,093 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Penyajian Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.
3. Nilai koefisien variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) adalah sebesar 0,311 artinya jika variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1

satuan maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga akan meningkat sebesar 0,311 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

4. Nilai koefisien variabel Kualitas Laporan Keuangan (X3) adalah sebesar 0,570 artinya jika Kualitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga akan ikut meningkat sebesar 0,570 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

### Uji T (Secara Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.216. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.216 > 1,986$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Penyajian Laporan Keuangan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y).
2. Pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.938. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.938 > 1,986$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y).
3. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 5.733. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $5.733 > 1,986$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen Kualitas Laporan Keuangan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y).

### Uji F (Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel bebas terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Besarnya nilai F-tabel dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$ , pada tabel f statistik diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,704. Hasil uji F (simultan) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.228	3	27.743	22.069	.000 <sup>b</sup>
	Residual	114.393	91	1.257		
	Total	197.621	94			

a. Dependent Variable: Y (Akuntabilitas Pelaporan Keuangan)  
 b. Predictors: (Constant), X3 (Kualitas Laporan Keuangan), X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan), X1 (Penyajian Laporan Keuangan)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 6. diketahui nilai F-hitung sebesar 22,069 dan nilai



signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $22,069 > 2,704$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ( $0,00 < 0,05$ ). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

### Uji Koefisien Beta (Uji Dominasi)

**Tabel 7. Hasil Uji Beta Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Standardized Coefficients
		Beta
1	(Constant)	
	X1 (Penyajian Laporan Keuangan)	.184
	X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan)	.238
	X3 (Kualitas Laporan Keuangan)	.483

a. Dependent Variable: Y (Akuntabilitas Pelaporan Keuangan)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 7. terlihat bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan (X3) adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar. Artinya, variabel dependen Akuntabilitas Pelaporan Keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Kualitas Laporan Keuangan (X3) dibandingkan dengan variabel lain. Nilai koefisien beta yang dimiliki oleh variabel Kualitas Laporan Keuangan (X3) sebesar 0,483 dan bertanda positif, hal ini yang berarti bahwa semakin baik Kualitas Laporan Keuangan yang diterapkan atau diberikan maka semakin meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$  Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.649 <sup>a</sup>	.421	.402	1.12119	1.823

a. Predictors: (Constant), X3 (Kualitas Laporan Keuangan), X2 (Aksesibilitas Laporan Keuangan), X1 (Penyajian Laporan Keuangan)  
 b. Dependent Variable: Y (Akuntabilitas Pelaporan Keuangan)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 8. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien determinasi  $R^2$  atau R Square adalah sebesar 0,421. Hasil ini berarti bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan (X3) memiliki hubungan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) sebesar 42,1%, dan sisanya 57,9% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

### PEMBAHASAN

## **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Penyajian Laporan Keuangan mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Penyajian Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Adapun hasil uji  $t$  yang telah dilakukan menemukan pada variabel Penyajian Laporan Keuangan dimana telah diperoleh  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Penyajian Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya, serta apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros juga telah disusun secara lengkap meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan tersebut akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Dengan demikian, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Fauziyah dan Handayani (2017), bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas.

Sayuti, dkk. (2018) juga mengemukakan bahwa tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan.

## Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Aksesibilitas Laporan Keuangan mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini memiliki artian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Maros telah memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan baik itu dari kalangan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah, selain itu pula masyarakat dapat mengakses laporan keuangan yang dibutuhkan melalui *website* resmi pemerintah daerah Kabupaten Maros pada laman <https://maroskab.go.id/> dan <https://ppid.maroskab.go.id/page/informasi/berkala>. Dengan demikian, akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efektif karena informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah memiliki akses untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Hasil dalam penelitian ini didukung oleh pendapat Fauzani, dkk. (2018) bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin mudah diakses oleh publik maka akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika laporan keuangan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Sementara itu, Sande (2013) dalam penelitiannya menegaskan bahwa akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistim informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

### **Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil jika Kualitas Laporan Keuangan mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara Kualitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan menemukan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan dimana telah diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros dapat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah Kabupaten Maros telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, dimana jika dilihat dari informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan material serta dapat diverifikasi. Selain itu, informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga, dapat membantu untuk mengevaluasi peristiwa dan membuat keputusan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros juga berguna untuk dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dengan demikian, adanya laporan keuangan berkualitas yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Maros yang kemudian telah disusun dengan baik dapat menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Sari dan Nurlaila (2022) bahwa salah satu bentuk pertanggung jawaban atau akuntabilitas keuangan pemerintah adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dimana laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Lebih lanjut Ningtyas dan Widyawati (2015) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP dalam laporan keuangan yang disajikan diyakini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, yang berarti laporan keuangan pemerintahan akan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

Lestari dan Dewi (2020) juga menyatakan bahwa untuk dapat menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus

disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu bentuk dalam upaya mewujudkan akuntabilitas keuangan, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dikarenakan laporan keuangan berkualitas tersebut telah dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat memengaruhi keputusan.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros**

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan, variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maros telah mengambil tindakan yang efektif dalam memperbaiki ketiga aspek ini.

Penyajian Laporan Keuangan yang lebih baik, yang mencakup informasi yang jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan, telah meningkatkan akuntabilitas dengan membuat transaksi pemerintah menjadi lebih transparan. Aksesibilitas Laporan Keuangan yang lebih baik, melalui website resmi pemerintah daerah dan media lainnya, memungkinkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk lebih mudah mengakses informasi keuangan, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas.

Penyajian laporan keuangan yang baik menciptakan dasar yang kuat untuk akuntabilitas, sedangkan aksesibilitas yang baik memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tersebut. Kualitas laporan keuangan memberikan keandalan dan relevansi yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas. Ini berarti bahwa pentingnya melihat ketiga aspek ini secara bersamaan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, penting untuk terus meningkatkan ketiga aspek ini secara bersamaan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud dengan lebih baik, memberikan manfaat kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan keuangan daerah.

### **Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan adalah variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini berdasarkan bahwa, laporan keuangan yang berkualitas adalah sumber informasi yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan, seperti pihak berwenang, badan pengawasan, dan masyarakat umum. Informasi yang relevan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, sementara keandalan informasi memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Ini penting untuk menciptakan dasar yang kuat untuk akuntabilitas.

Selain itu, laporan keuangan berkualitas harus mematuhi standar akuntansi yang



berlaku. Kepatuhan ini menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam penyajian informasi keuangan, yang dapat dengan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan. Hal ini membantu dalam membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Laporan keuangan berkualitas juga haruslah menyediakan pengungkapan yang memadai mengenai semua informasi yang relevan, termasuk informasi risiko dan ketidakpastian yang mungkin memengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Pengungkapan yang memadai menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, Kualitas Laporan Keuangan memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan oleh pihak berwenang, badan pengawasan, dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang berkualitas membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Kualitas dalam laporan keuangan ini juga membantu pemangku kepentingan, termasuk badan pengawasan dan masyarakat umum, untuk memahami dan menilai situasi keuangan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.
2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.
3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.
4. Variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, kemudahan publik dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah yang berkualitas.
5. Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.



## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzani, F. M., Purwati, A. S., & Sudjono, S. (2018). Analisis persepsi pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 8(1).
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Muhammad, H., Sylvia, S., Fitriani, L., & Nurhaedah, N. (2022). Kajian Evaluasi Sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2022. *Naskah Akademis*.
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(1).
- Sari, A. P., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(2), 172-181.
- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.
- Utari, N., Firman, A., & Rahman, M. R. G. (2023). PENGARUH LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia (JPMI)*, 2(4), 461-475.
- Wardiningdyah, S. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. Jakarta: Publikasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/upload/DOCUMENTS/PUBLIKASI/4.%20Analisis%20Laporan%20Keuangan%20Pemerintah%20Pusat%20Dan%20Daerah.pdf>)